YANG TERPINGGIRKAN KINI TELAH BANGKIT

Sueb
Politeknik TEDC Bandung

Abstrak

Sejarah membuktikan bahwa perjuangan yang melibatkan komunitas masyarakat akan berpengaruh terhadap tatanan masyarakat saat itu, dan berdampak pada kehidupan generasi yang akan datang. Untuk itu pengambilan keputusan yang melibatkan kolektif merupakan persyaratan yang diperlukan bagi terciptanya harmonisasi dari suatu komunitas, tetapi apabila suatu keputusan bertentangan dengan harapan masyarakat, maka akan muncul kontra produktif, sehingga terjadi tarik menarik antara kekuatan yang menginginkan perubahan dan kekuatan yang tidak mengharapkan suatu perubahan. Manhaj Tarbiyah sebagai organisasi masyarakat memiliki kepentingan dalam menyadarkan masyarakat terutama Umat Islam Indonesia saat ini yang hanya menang sebagai mayoritas statistic, namun gagal dalam mayoritas politik yang islami. Melalui Manhaj Tarbiyah masyarakat yang konsen terhadap suatu perubahan dapat akses atau ikut berpartisifasi pada tingkat legislative dan eksekutif, sehingga dakwah tidak hanya terlaksana di masyarakat umum, melainkan juga dakwah menyebar ke tingkat pemerintahan.

Kata kunci : Manhaj Tarbiyah, Legislatif, Eksekutif.

Abstract

It has proven in the history that the struggle involving community in a society will give influence to the community rules at that time, and will give effect to the life of future generation. For that reason, the decision making that involves society becomes the requirements which are needed to create harmonization of a community. However, if the decision is contradict with the expectation between the powerful community who are willing a change to happen and those who do not expect any changes. Manhaj Tarbiyah as a social organization, wants to make the society especially the Moslems in Indonesia realizing the situation. At present, Moslems in Indonesia have only won in the statistical majority, but fail in the Islamic political majority. By the organization of Manhaj Tarbiyah, the people who concern about the change of situation can access or take part in the legislative and executive levels. So that a religious proselytizing can be done not only in the public society but also in the government society.

Keywords : Educational System, Legislatif, executive

Peristiwa masa lalu yang menimpa Bangsa Indonesia tidak pernah kita lupakan, yakni selama 350 tahun dijajah, rakyatnya ditindas dan kekayaannya dieksploitasi, dijadikan bangsa yang bodoh sehingga mudah untuk diadudomba. Pengalaman pahit tidak berhenti disitu saja, penjajah telah berhasil memperdaya dan memerintah Bangsa Indonesia dengan system dan budaya mereka yang kerap bertentangan dengan nilai-nilai, dan norma-norma serta budaya bangsa kita.

Dari sisi kehidupan beragama penjajah telah merusak sendi-sendi agama mayoritas bangsa Indonesia, yakni Agama Islam. Mereka berupaya mencemari pemahaman Islam yang benar dengan memisahkan kehidupan dunia dari kehidupan agama, sehingga hasilnya islam dipandang hanya sebatas gerakan rokaat sholat saja, perhimpunan dzikir yang kering dan bacaan Qur'an di atas pusara kematian (Masyhur, 2000 : 2).

Bukti nyata bahwa para tokoh masa lalu telah meletakkan dasar-dasar islam yang dapat kita

saksikan saat ini disetiap pusat kota misalnya di kota yang ada di Jawa Barat dan Banten, sekalipun mungkin hanya berupa simbol ritual yakni dengan dibangunnya : masjid, pendopo, dan Kantor Urusan Agama. Namun sadar atau tidak, penjajah memang datang dengan tidak merusak mesjid, pendopo, dan juga Kantor Urusan Agama, tetapi disitu didirikan suatu bangunan pusat hiburan rakyat seperti bioskop. Ini dapat diartikan secara tidak langsung sekulerisme mulai ditanamkan sebaga proses penjauhan umat islam dari agamanya.

Dalam kondisi seperti itu, kemerdekaan datang, dan segera pemerintahan pribumipun mengambil alih kekuasaan, namun gaya pemerintahan dan perundang-undangan yang dipakai adalah system yang dipergunakan penjajah. Hal ini telah disadari sejak awal bahwa berdirinya Republik Indonesia sudah terdapat pro dan kontra tentang falsafah Negara seperti ada yang mengusulkan sosialis, nasionalis dan nasionalisme islam.
Ini terbukti ketika Soekarno membacakan teks Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bukan Piagam Jakarta, meskipun sudah disepakati dalam rapat BPUPKI dan PPKI bahwa Piagam Jakarta adalah Teks Proklamasi (Akbar, 2001 : 15). Dipihak lain pembacaan teks proklamasi kemerdekaan tersebut oleh Soekarno didasari oleh hasil *perjanjian luhur* dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dengan pertimbangan berbagai aspek yang mendukung sebagai proses penampungan aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan.

Kedua statemen tersebut di atas menunjukan ketidakharmonisan dari sejak awal merdeka, merambat hingga zaman Orde Baru atau mungkin sampai sekarang.
Menyimak perjalanan bangsa Indonesia yang sampai saat ini, telah mengalami beberapa kali masa transisi, yaitu kondisi terjajah dan merdeka, bahkan dalam kondisi merdekapun belum mengakhiri persoalan-persoalan yang mendasar dalam kehidupan rakyat yang menyeluruh.

Pada rezim Orde Lama, kita tahu bias pada pembangunan politik, efek negatifnya justru menciptakan ketidakstabilan politik karena kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat, meskipun pada diri Soekarno menunjukan suatu pribadi sebagai seorang yang sangat berkobar juga berbakat mengumpulkan simbol-simbol kedalam sebuah *state-religion*. Geertz menyatakan pada diri Soekarno terpadu sejumlah simbol yang terstruktur oleh beberapa konsepsi: Marx, Islam-Muhammadiyah, Nasionalis, Priyayi Jawa-Bali dan Barat (Malik,2000: 17).

Battle menyatakan : masyarakat sering terjebak dalam sikap pragmatis, yang suka menyuguhkan gambaran-gambaran realitas yang sesungguhnya semu, untuk mengalihkan perhatian dari apa yang sesungguhnya masyarakat harapkan. Kepalsuan itu terbukti tahun 1960 kelompok agama kehilangan organisasi tempat bernaung, terutama setelah Masyumi dibubarkan dan para pemimpin pentingnya dipenjarakan, sehingga apa yang dikatakan Boland (Malik, 2000 : 155) banyak pemimpin Islam yang bersikap kritis terbuka terhadap Soekarno, tahun-tahun tersebut adalah tahun-tahun yang penuh dengan fitnah, teror malam hari, serta suasana tanpa hukum.
Pergantian rezim dari Orde Lama berganti rezim Orde Baru belum membawa angin segar bagi Umat Islam, sekalipun pada awal rezim Orde Baru berkuasa "mampu menggeser paradigma pembangunan lama dan menekankan perlunya basis ekonomi yang kuat untuk menghindari konflik-konflik berkelanjutan" (Nugroho, 2001 : 108). Anggapan menciptakan stabilitas nasional, melalui tangan militer dan birokrasi sipil yang dikuasainya, telah meminggirkan secara sistematis peranan politisi islam garis keras dan pada saat yang sama mengkooptasi elit politik Islam garis lunak (Darwin, 2000 : xlix). Mulai awal tahun 1970an, "tatkala isme-isme yang bertentangan dangan Pancasila tidak diberi hak untuk hidup dan berkembang serta dirasakan tidak ada ancaman ideology, khasanah pengetahuan Islam dicampakan sebagai ilmu" (Usman, 1998 : 164).

Sebagai upaya peminggiran terhadap umat Islam, ditetapkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai pollitik dan Golongan Karya yang menjelaskan bahwa pada asas, Tujuan dan Program : Ketentuan Pasal 2 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut : "(1) Partai Politik dan Golongan Karya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. (2) Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" (Garuda emas Pancasila Sakti, 1995 : 162).

Sebagai konsekuensi dari Undang-undang itu organisasi-organisasi yang tidak menerima asas tunggal merupakan organisasi yang terlarang, seperti halnya Organisasi Pelajar Islam Indonesia (PPI) yang dikenal sbagai organisasi pelajar yang sangat

konsisten mengamalkan Islam, dan sejak awal menolak secara tegas ide tentang asas tunggal tanpa kompromi. Akibatnya organisasi tersebut dibubarkan dan dianggap terlarang berdasarkan Surat Keputusan Mentreri Dalam Negeri Nomor : 120 Tahun 1987 (Damanik, 2002 : 53).

Saat rezim Orde Baru format politik cenderung memisahkan agama dan politik. Undang-undang kepartaian tampak menghindari kemungkinan tumbuhnya partai agama. "*aqidah* boleh saja bersumber pada ajaran agama, tetapi asas partainya hanya satu yaitu pancasila" (Usman, 1998 : 177).
Selama 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa di Republik Indonesia dan diakhiri dengan krisis yang berkepanjangan serta diikuti dengan berkembangnya ketidakpastian politik, merebaknya konflik dan kekerasan yang menjurus pada anarkisme.
Di bidang Sosial munculnya dehumanisasi moral pada semua lapisan masyarakat, kriminalitas, korupsi, bahkan sikap saling curiga mencurigai yang membuahkan krisis kepercayaan. Dari bidang hukum penegakan hukum demi terjaminnya keadilan bagi semua rakyat masih juga terabaikan; dari bidang ekonomi "masalah utang yang dihadapi Indonesia telah sampai pada batas mencekik leher. Selain memikul utang luar negeri sebesar hampir 150 miliar dolar AS, Indonesia kini juga memikul utang dalam negeri sebesar Rp. 650 Triliun. Dengan demikian secara keseluruhan Indonesia kini menanggung beban utang sebesar Rp. 2.100 Triliun" (Baswir, 2003 : 61).

Keterpurukan tersebut di atas, akibat *mal-decision* rezim pemerintah masa lalu dimana rakyat sangat terkekang, tidak memiliki ruang gerak untuk mengontrol pemerintah. Hasilnya krisis ekonomi telah dirasakan sejak tahun 1997, "yang mengakibatkan turunnya pemerintahan Orde Baru dan telah mendorong meluasnya gerakan masa rakyat menuntut perubahan tata pemerintahan" (Effendi, 2003 :ix).
Berakhirnya pemerintah Orde Baru pada bulan Mei 1998, melalui rezim reformasi nampaknya membawa angin segar bagi masyarakat, yaitu dicabutnya asas tunggal dan dibubarkannya P4, sehingga memberikan kesempatan kepada organisasi masyarakat untuk berkiprah diantaranya adalah bergeraknya kembali organisasi masyarakat yang bernafaskan islam, memberikan nuansa sebagai organisasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan aqidah, hukum dan sistem yang tidak dibatasi oleh tema dan tidak diikat oleh jenis dan suku bangsa. Ini diperkirakan dapat memberikan perubahan yang lebih baik untuk mencapai hasil yang optimal.

Hadirnya organisasi masyarakat tersebut membawa harapan dan cita-cita untuk menumbuhkan kembali rasa bangga masyarakat terhadap Indonesia dan diharapkan sebagai perekat diantara umat Islam, yaitu gerakan sosial Manhaj Tarbiyah.
Gerakan sosial Manhaj Tarbiyah tersebut diarahkan untuk mendorong dan menumbuhkan jiwa mandiri yang bebas dari dominasi dan eksploitasi yang dapat membangun negaranya, bukan menjadi tamu dirumahnya sendiri.
Manhaj ini memiliki argument bahwa keadilan dan kesejahteraan tidak akan datang dengan sendirinya tetapi harus diperjuangkan. Dengan demikian gerakan sosial Manhaj Tarbiyah yang bernafaskan Islam, dijadikan sebagai instrument perjuangan dan sekaligus jawabannya, yang diharapkan dapat memberikan warna baru bagi Indonesia.

Sejalan dengan pernyataan Balda (2001), bahwa gerakan Manhaj Tarbiyah ini muncul dari asumsi bahwa kondisi nyata umat Islam saat ini menunjukan umat islam membutuhkan perhatian untuk disadarkan akan kewajiban dan haknya sebagai warga negara dimana sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam yang hanya menang sebagai mayoritas statistic, tatapi gagal dalam mayoritas politik.
Realitas menunjukkan bahwa, mayoritas terkadang menjadi kebanggaan umat Islam, yang hanya senang membuat suatu kerumunan dan perkumpulan dengan tidak memiliki agenda yang jelas dan terprogram, tetapi pihak luar sekalipun anggotanya sedikit merupakan kekuatan yang handal karena memiliki suatu program, jaringan dan rencana-rencana strategis dengan militansi yang tangguh.
Disamping itu umat islam kadang-kadang tergiur dengan suatu figur kepemimpinan yang bias dengan keaktoran, bukan pada isme, tertarik dengan siapa yang bicara bukan pada apa yang disampaikan dan bagaimana pola hidupnya.

Disisi lain umat Islam terkadang mudah tersulut amarah, Ketimbang melakukan suatu politisasi, sehingga kemarahan dan emosional sesaat, tidak banyak mempengaruhi perkembangan politik dan masyarakat apalagi mengontrol penguasa.

Gerakan sosial yang diorganisir Manhaj Tarbiyah sebagai kelompok yang memiliki visi dan misi dalam meningkatkan sumber daya manusia serta mengkader anggotanya untuk akses ke legislatif dan eksekutif.

PENUTUP

Manhaj Tarbiyah kerap disebut Kelompok Tarbiyah sebagai organisasi Islam yang mandiri, bukan sempalan organisasi Islam yang ada di Indonesia seperti halnya Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), Persis dan lain-lain. Organisasi ini hadir sejak Tahun 1980-an yang dikembangkan atau dimotori oleh alumni perguruan tinggi di kawasan Timur Tengah. Pendekatan Qolbu, bersumber pada Ajaran Al-Qur'an dan Hadits Nabi merupakan teknik dan startegi dalam pelaksanaan dakwahnya.

Pendekatan qolbu menumbuhkan idealisme keislaman yang murni dan konsekwen karena telah disiapkan pendidik yang memiliki integritas pribadi yang tinggi, jujur, sederhana dan bersifat kemitraan, antara kata dan perbuatan seirama. Ini merupakan kunci utama dalam menarik generasi muda dan masyarakat yang haus akan realisasi sebuah kebenaran.

Daftar Pustaka

Akbar, Apri. Juni 2001. Sabili Nomor 26 tahun VIIi : *Dosa-dosa Politik Soekarno terhadap Umat Islam – Mengkritisi Peringatan 100 tahun Soekarno 6 Juni 1901 – 6 Juni 2001*. Jakarta : PT Bina Media sabili.

Arifin, Syamsul. 2000. *Merambah Jalan Baru Dalam Beragama*. Yogyakarta : ITTAQA Press.

Al-Bana, Hasan. 1986. *Imbauan Kami* (Penerjemah Ki Agus MS agustjik). Jakarta : Yayasan Bina Umat.

Beilharz, Peter. 2002. *Teori-teori Sosial – Observasi Kritis terhadap para Filosof terkemuka* (Alih Bahasa Sigit Jatmiko). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Baswir, Revrisond. 2003. *Di bawah ancaman IMF*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Mahardika, Timur. 2000. *Gerakan Massa – Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan secara damai*. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama.

Maliki, Zainuddin. 2000. Agama Rakyat – *Agama Penguasa, Konstruksi tentang Realitas Agama dan Demokrasi*. Yogyakarta : Galang Press.

Masyhur, Musthofa. 2000. *Islam adalah Solusi Jawaban atas Tuduhan* (Penerjemah Nandang Burhanudin). Jakarta : Kafila Press.

Rahardjo, Bambang; syamsulhadi. 1995. *Garuda Emas Pancasila Sakti*. Jakarta : Yayasan PETA Pusat.

Takariawan, Cahyadi. 2003. *Rekayasa Masa Depan Menuju Kemenangan Dakwah Islam*. : Pustaka Tarbiyatuna

Usman Sunyoto. 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.